
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA 2016

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 serta merupakan penjabaran tahun ke dua dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 s/d 2019.

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berisi gambaran unit kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2016, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya di tahun 2016.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 2016

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015- 2019. Disebutkan bahwa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2019. Selanjutnya Renja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan pentingnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk penegakan hukum telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/PHLHKSETDIT/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Upaya tersebut dituangkan salah satunya sebagai Rencana Kerja Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2016 dan selanjutnya memberikan dampak pada pencapaian sasaran yang tercantum pada Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 -2019. Proses penyusunan Renja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK ini dilakukan melalui rangkaian diskusi dan penelaahan hasil evaluasi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, upaya- upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.

KONDISI SAAT INI

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 disusun berdasarkan target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam di dalam Renstra Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLH-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja yang dicapai pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, diharapkan dapat mencapai kinerja pada skala Direktorat Jenderal PHLHK. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PH LHK berjalan secara efektif dan efisien, baik di pusat maupun daerah (UPT dan Pemerintah Daerah). Dengan demikian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PHLHK memiliki potensi dan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal, beberapa diantaranya telah diungkapkan dalam Sub Bab 1.1 tersebut di atas. Secara garis-besar, hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas adalah sebagai berikut:

A. Internal

a. Potensi:

- Kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih luas, sebagai implikasi dari bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK, antara lain karena bertambahnya jumlah Undang Undang yang berkenaan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Peraturan perundang-undangan pada tingkatan normatif cukup sebagai landasan hukum.
- Jumlah sumber daya potensial juga bertambah signifikan, sebagai implikasi dari bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Sumberdaya aparatur pada tingkat manajemen sudah mendukung penerapan penegakan hukum.

b. Permasalahan:

- Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat pertumbuhan kapasitas lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan problematik yang mesti dihadapi/diatasnya, seperti misalnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun, kasus ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan keanekaragaman hayati yang cenderung meningkat, dst. Kapasitas Ditjen PHLHK, terutama *leadership* dan manajemennya, masih harus diperkuat, agar mampu meyakinkan pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup kepada instansi-instansi terkait. Kapasitas yang sekarang ini akan menjadi relatif kurang memadai jika dibandingkan dengan tantangan dan situasi yang tumbuh dan berkembang pada kurun waktu belakangan ini hingga tahun 2019. Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum yang memadai relatif dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai relatif dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi.
- Akses informasi bagi publik yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain agar publik dapat berperan serta, antara lain melalui mekanisme *whistle blower*, kontrol sosial, pengaduan, dan peranserta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi.
- Jumlah PPNS dan PPLH tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana, antara lain karena persoalan jabatan fungsional nya.
- Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum lengkap dan atau perlu dimutakhirkan.

B. Eksternal

a. Potensi:

- Peran penegakan hukum merupakan bagian penting dari isu mengenai keadilan, dan isu ini diposisikan pada tiga isu strategis dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (RPJMN 2015-2019).
- Penegakan hukum lingkungan hidup diamanatkan secara eksplisit, kepada kementerian yang membidangi lingkungan hidup, oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

- Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan, demikian juga perhatian, dukungan, aspirasi, dan ekspektasi publik yang besar pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

b. **Permasalahan:**

- Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan, dst.
- Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Kapasitas penegakan hukum di Kabupaten berada pada nilai indeks yang terendah, sedangkan di tingkat Nasional pada nilai indeks yang tertinggi. Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perubahan manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.
- Kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi.
- Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal.
- Besarnya harapan rakyat akan keadilan.
- Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

BAB II REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2015

Entitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai institusi baru, memiliki tantangan yang sangat berat dalam membangun dan menata organisasi guna mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 ini, ditetapkan indikator kinerja program penegakan hukum dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHLHK adalah SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 70 point. Instrumen untuk mengukur indikator kinerja program tersebut terdiri dari 10 instrumen sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini.

Table 30. Sasaran Program Dukungan Manajement Ditjen PHLHK

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	SASARAN PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK			
III	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :			
a.	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5.IKK.a)	70 Point	61 Point	88,57 %

Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan kegiatan teknis Ditjen PHLHK tahun 2015 ini dilaksanakan pada 52 (lima puluh dua) satuan kerja, yang meliputi penyediaan anggaran, sarana dan prasarana serta perangkat operasional lainnya seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Guna terlaksananya tata kelola birokrasi penegakan hukum maka ditetapkan 10 indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2015, pengukuran kinerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan pada

semester I dengan Nilai 61 point. Tercapainya nilai SAKIP 2015 sebesar 61 point untuk institusi yang baru berdiri merupakan suatu pencapaian yang cukup bagus.

Beberapa yang mendukung tercapainya hal-hal tersebut adalah :

A). BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

- a. Dokumen anggaran kegiatan pada 52 Satuan Kerja, selama tahun 2015 Kegiatan dukungan manajemen telah berhasil menyelesaikan DIPA untuk 52 satuan kerja dan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2016 disiapkan sebanyak 77 dokumen atau naik 148 %.
- b. Dokumen Rencana Strategis Ditjen PHLHK 2015 – 2019 dan Dokumen Rencana Strategis 2015 – 2019 Direktorat Teknis Lingkup Ditjen PHLHK telah disahkan dengan memuat Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum selama 5 (lima) tahun sejak 2015 sampai dengan 2019.
- c. Rencana Kerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahun 2016 telah ditetapkan dan dituangkan dalam PK dengan 5 Direktorat Teknis ditambah 50 Kepala Balai Taman Nasional dan 27 Kepala Balai KSDA.
- d. Berdasarkan penilaian Inspektorat Wilayah III, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum sebagai organisasi yang baru terbentuk telah memenuhi SAKIP senilai 61,29 point sehingga mencapai 87,56 % dari target. Sedangkan penilaian atas pengendalian internal organisasi (SPIP) sebesar 3,26 Point (dengan basis skala 1 – 5).
- e. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum mengembangkan sistem komunikasi dengan publik berupa Sosial Media (facebook dan twitter); dan Aplikasi Gakkum di sistem operasi mobile (android dan iOS) dengan capaian 100%.
- f. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK juga mengembangkan sistem komunikasi dengan media, dengan pelaksanaan media briefing direncanakan tiap bulan dan telah direalisasikan sebanyak 2 kali atau 33,33%. Serta fasilitasi peliputan kegiatan penegakan hukum ke lapangan sebanyak 6 kali dari rencana sebanyak 5 kali atau 120%.
- g. Peningkatan kapasitas publik dalam penegakan hukum melalui kampanye penegakan hukum bersama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 kali atau 100% dan Iklan penegakan hukum di 4 televisi atau 100 %.

B). BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

1. Pengelolaan anggaran Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.159.006.213.000,- dengan realisasi 119.549.988.455,- atau 75,19%.
2. Penyediaan sarana dan prasana perkantoran dan kebutuhan pegawai. Selama tahun 2015, telah disediakan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan hutan sebanyak 135 unit mobil, yang terdiri dari :
 - Mobil Patroli Pengamanan Hutan sebanyak 74 unit
 - Mobil SPORC sebanyak 48 Unit
 - Mobil Satgas Penegakan Hukum sebanyak 5 Unit
 - Mobil Operasional Eselon I sebanyak 1 unit
 - Mobil Operasional eselon II sebanyak 5 unit
 - Mobil Operasional perkantoran sebanyak 3 unit
3. Selain penyediaan sarana juga telah ditingkatkan peralatan untuk kebutuhan pegawai berupa meubelair, computer, laptop, kamera, printer, dan peralatan lainnya dengan realisasi pelaksanaan kegiatan ini sebesar 89 %.

C). BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan pengembangan organisasi yang merupakan tugas dan fungsi bagian hukum telah menyelesaikan naskah akademik pengembangan organisasi Ditjen PHLHK sebanyak 1 dokumen 100%.
2. Bantuan hukum juga telah diberikan kepada personil, yang terkait masalah tuntutan dari pihak luar akibat pelaksanaan tugas penegakan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum diberikan pada Direktur, pejabat struktural dan PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang digugat TUN pada PN Tenggara dalam kasus pertambangan illegal di Kalimantan Timur

D). BIDANG KEPEGAWAIAN

1. Penataan dan penempatan pegawai Ditjen PHLHK telah dilaksanakan mulai dari eselon I sampai dengan staf dengan jumlah sebanyak 277 orang. Penetapan tersebut juga dibarengi dengan pembagian tugas pokok dan fungsi seluruh Staf Lingkup Ditjen PHLHK
2. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas pegawai secara rutin dilaksanakan tiap bulan, dari rencana 4 kali telah direalisasikan sebanyak 6 kali atau 120 %.
3. Kegiatan pendukung organisasi juga dilaksanakan dengan sosialisasi organisasi penegakan hukum ke 5 Universitas yakni : Riau, Jambi, Ambon, Jakarta, dan Samarinda.

FAKTOR – FAKTOR KEBERHASILAN DAN ATAU KENDALA/HAMBATAN

Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan kegiatan teknis Ditjen PHLHK lebih rendah dari target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Waktu efektif menjalankan organisasi Ditjen PHLHK dimulai pada Bulan Juli 2015 atau sekitar 6 Bulan. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum harus menyiapkan perangkat organisasi sampai pada level operasional di lapangan.
2. Pelaksanaan waktu penilaian SAKIP yang dilakukan pada Bulan Juli dirasakan sangat tidak fair, dimana kegiatan dan organisasi baru berjalan menyiapkan perangkat organisasi.
3. Komposisi dan struktur anggaran DIPA Ditjen PHLHK yang 20 % merupakan PNPB serta pengalokasian tambahan anggaran di Bulan Oktober 2015.

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja sasaran program dukungan manajemen dan teknis kegiatan Ditjen PHLHK termasuk dalam kategori efektif dan efisien, sebagaimana table dibawah ini.

Tabel . Perhitungan efektivitas dan efisiensi Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

No	Indikator	Capaian				Efek- tivitas (D/C)	Efisi ensi (D/F)
		Capaian OP		Pagu 2015			
		2014	2015	Real	Capaian		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Dukungan Manajemen dan teknis kegiatan Ditjen PHLHK	-	61	119.549.988.455	75,18 %	> 1	0,81

Nilai efektifitas capaian kinerja IKP dukungan manajemen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan adalah > 1 ; yang berarti pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan teknis kegiatan Ditjen PHLHK dilaksanakan secara efektif dan focus pada pencapaian output dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 2014. Sedangkan nilai untuk efisiensi penggunaan anggaran IPK manajemen dan teknis kegiatan Ditjen PHLHK sebesar 0,81 atau < 1 ; yang berarti pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang efisien.

C. KINERJA ANGGARAN SETDITJEN GAKUM LHK

Tahun anggaran 2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat alokasi pagu sebesar Rp.85.358.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp.67.589.154.128,- atau 78,90%, dengan uraian penjelasan sebagaimana table dibawah ini.

TABEL REALISASI TAHUN 2015

UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	UNIT INDIKATOR	ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN (IKE)	REALISASI TAHUN 2015
PROGRAM DAN EVALUASI	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, DATA DAN INFORMASI, EVALUASI DAN LAPORAN DITJEN PHLHK	PROGRAM DAN EVALUASI	DOKUMEN PROGRAM DAN ANGGARAN	RENCANA STRATEGIS DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN
				RENCANA KERJA DITJEN PHLHK TA 2016	1 DOKUMEN
				KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG GAKKUM 2015	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG GAKKUM TA 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				BIMTEK PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN GAKKUM TA 2015	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN RENCANA KERJA SETDITJEN GAKUM TA 2016	1 DOKUMEN

				PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA KL BIDANG GAKKUM TA 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
			DOKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN	PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN LAKIP SETDITJEN GAKUM TA 2015	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER SETDITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
			DOKUMEN DATA DAN INFORMASI	PENGUMPULAN BAHAN BUKU STATISTIK DITJEN GAKUM 2015	1 DOKUMEN
				PENYEBARLUASAN INFORMASI BIDANG GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN

HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS DITJEN PHLHK	HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS	DOKUMEN KERJASAMA DAN KEMITRAAN	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN K/L TERKAIT	1 DOKUMEN/LA YANAN
				PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	1 DOKUMEN/LA YANAN
			DOKUMEN RANCANGAN PERPU BID GAKKUM	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG GAKKUM	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN SOP KOORDINASI	1 DOKUMEN
				REVISI PERMENHUT NO 75 TAHUN 2014 TENTANG POLISI KEHUTANAN	1 DOKUMEN/LA YANAN
				KONSULTASI HUKUM DENGAN PENGACARA	1 DOKUMEN/LA YANAN
KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA	DOKUMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	PENYUSUNAN DATA SIMPEG DAN SAPK	1 DOKUMEN/LA YANAN

					PELANTIKAN/SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL	1 DOKUMEN/LAYANAN
					FORMASI PEGAWAI	1 DOKUMEN/LAYANAN
					PEMBERKASAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (STRUKTURAN DAN REGULER) 2 Periode	1 DOKUMEN/LAYANAN
					PENYUSUNAN DUK	1 DOKUMEN/LAYANAN
					PENATAAN PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL LINGKUP GAKKUM	1 DOKUMEN/LAYANAN
					PEMBINAAN PEGAWAI LINGKUP DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/LAYANAN
					PEMBINAAN KELEMBAGAAN LINGKUP DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/LAYANAN

KEUANGAN DAN UMUM	TERSELENGGARANYA PELAKSANAAN KEUANGAN DAN UMUM	KEUANGAN DAN UMUM	DOKUMEN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA	1 DOKUMEN/LAYANAN
				PENYEMPURNAAN DAN PEMANTAPAN ORGANISASI	1 DOKUMEN/LAYANAN
				PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DITJEN DAN SETDITJE GAKUM SEMESTER I TAHUN 2015	1 DOKUMEN/LAYANAN
			DOKUMEN KEUANGAN	LAPORAN SAK UAKPA TRIUWLAN TAHUN III TAHUN 2015	1 DOKUMEN/LAYANAN
				SATUAN PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH	1 DOKUMEN/LAYANAN
			DOKUMEN KETATAUSAHAAN DAN UMUM	PENATAAN ARSIP DNA PENGHAPUSAN NON ARSIP LINGKUP SETDITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/LAYANAN
				PENGELOLAAN SURAT/DOKUMEN DINAS	1 DOKUMEN/LAYANAN

			DOKUMEN PERLENGKAPAN	EVALUASI KEBUTUHAN SARPRAS DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/LAYANAN
				PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA	1 DOKUMEN/LAYANAN

B. Perkiraan Realisasi Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun kedua periode pembangunan lima tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat meletakkan kondisi pemungkin bagi akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perkembangan pencapaian pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.

Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE) tahun 2016 sampai bulan Desember 2016 untuk mendukung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

TABEL PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2016

UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	UNIT INDIKATOR	ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN (IKE)	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2016
PROGRAM DAN EVALUASI	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, DATA DAN INFORMASI, EVALUASI DAN PELAPORAN DITJEN PHLHK	PROGRAM DAN ANGGARAN	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DITJEN PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN RENCANA KERJA SETDITJEN GAKUM TA 2016	1 DOKUMEN
				RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PHLHK TA 2016	1 DOKUMEN
			PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN STANDAR KEGIATAN DAB BIAYA BIDANG PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN

				SOSIALISASI JUKNIS ANGGARAN DAN SKB BIDANG PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN
				PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA KL DITJEN PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN
				KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PROSES BISNIS PENGANGGARAN DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				KELOMPOK KERJA PUG	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				MONITORING PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN DIPAPORISASI PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
		EVALUASI, PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI		PENYUSUNAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAKIP PHLHK TA 2015	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				RAKOR EVALUASI KINERJA DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN

				PEMANTAPAN EVALUASI DAN PELAPORAN (PEP) PELAKSANAAN KEGIATAN GAKKUM LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2015	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN SETDITJEN PHLHK TAHUN 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
			DOKUMEN DATA DAN INFORMASI	PENYUSUNAN BUKU STATISTIK DITJEN GAKUM 2015	1 DOKUMEN
				PENYAJIAN INFORMASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN BIDANG GAKKUM LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYEBARLUASAN INFORMASI BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN

				PAMERAN PENEGAKAN HUKUM LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENGELOLAAN OPERASIONAL ROOM DATA MANAJEMEN SYSTEM PENEGAKAN HUKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				MAINTENANCE APLIKASI DAN PUBLIKASI PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS DITJEN PHLHK	KERJASAMA TEKNIS	PENYUSUNAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA DALAM NEGERI	PENYUSUNAN KURIKULUM TERKAIT HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAUNCHING LOKAKARYA DAN PELATIHAN NASIONAL PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
			PENYUSUNAN KERJASAMA LUAR NEGERI	PENYELENGGARAAN KERJASAMA LUAR NEGERI	1 DOKUMEN

			HUKUM	PENYUSUNAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 DOKUMEN
					SOSIALISASI TENTANG PERATURAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KASUS LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		KEPEGAWAIAN	DOKUMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN BIDANG KEPEGAWAIAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENGEMBANGAN DAN EDITING SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PEMBERKASAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL	1 DOKUMEN/ LAYANAN

					PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					TATA NASKA DINAS KEPEGAWAIAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENYUSUNAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN UPT PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
			ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	DOKUMEN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PEMBINAAN KELEMBAGAAN LINGKUP DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LH	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYELENGGARAAN PEMBINAAN STAF DAN PUBLIK TERKAIT	PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN

KEUANGAN DAN UMUM	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM	ADMINISTRASI KEUANGAN	DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN	REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				KOORDINASIDAN PEMBINAAN KEUANGAN BAGIAN PELAKSANA ANGGARAN SATKER	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYEGARAN BENDAHARA PENGELUARAN DITJEN PHLHK TA 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PEMBAHASAN KEGIATAN BP/BPP SATKER SETDITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
			DOKUMEN KETATAUSAHAAN DAN UMUM	PENATAAN ARSIP DAN PENGHAPUSAN NON ARSIP LINGKUP SETDITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENGELOLAAN SURAT/DOKUMEN DINAS	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				LAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN

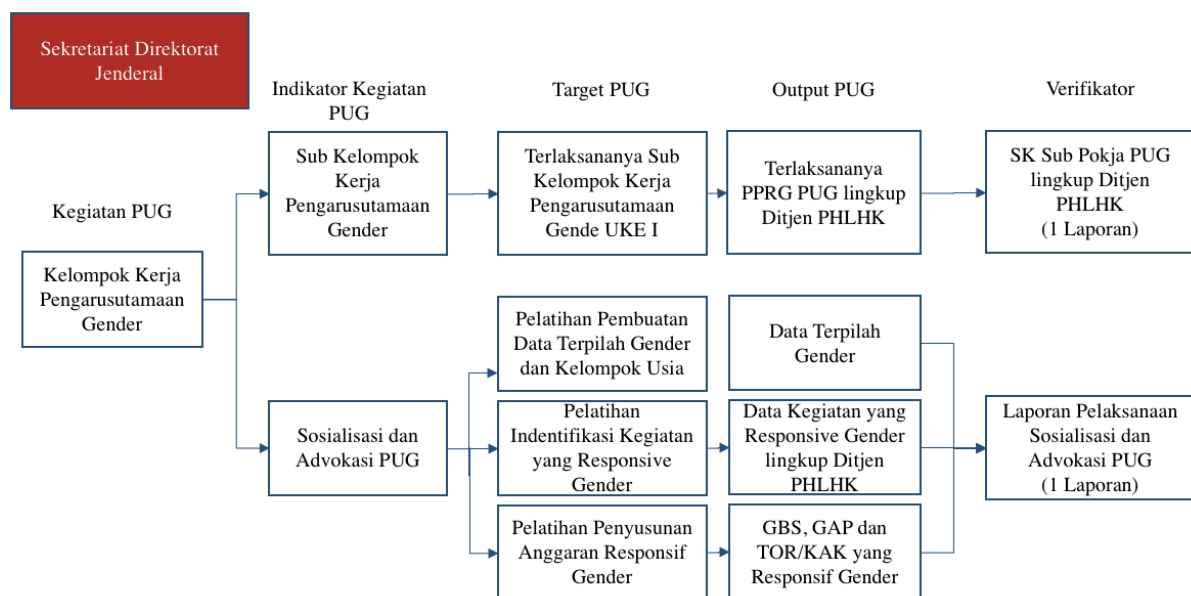
				SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
			DOKUMEN PERLENGKAPAN	EVALUASI KEBUTUHAN SARPRAS DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				BIMTEK DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BMN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				SOSIALISASI PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN TERBARU TERKAIT PENGELOLAAN BMN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN LAPORAN BMN DITJEN GAKKUM SEMESTER I 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN

Perencanaan Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Bedasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik ditingkat eksekutif maupun legislative. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender. Untuk memenuhi pelaksanaan pengarusutamaan gender, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan gambaran umum Pelaksanaan kegiatan:



Untuk menemukan dan menyusun data kegiatan yang *Responsive Gender* lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2016, perlu dilakukan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan sehingga pemahaman tentang Gender menjadi permulaan di dalam indentifikasi Kegiatan dan Proses Penyusunan GBS dan GAP di tahun tahun berikutnya.

C. TARGET KINERJA TAHUN 2017

Untuk mendukung tercapainya sasaran target kinerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya tahun 2017, seluruh unit kegiatan/elemen kegiatan di Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dapat dipastikan terlaksana dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik dan mendukung pencapaian target pembangunan program planologi kehutanan dan tata lingkungan

UNIT KEGIATAN/ELEMEN KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2017
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DITJEN PHLHK TAHUN 2017	1 DOKUMEN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SETDITJEN PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PHLHK TA 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN	
PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN
PENYUSUNAN STANDAR KEGIATAN DAN BIAYA BIDANG PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN
SOSIALISASI JUKNIS ANGGARAN DAN SKB BIDANG PHLHK TAHUN 2017	1 DOKUMEN
PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN/LAYANAN
PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA KL DITJEN PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN/LAYANAN
KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016 (PEMBENTUKAN UPT GAKKUM)	1 DOKUMEN/LAYANAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 DOKUMEN/LAYANAN
REVIU ANGGARAN BIDANG PENEGAKAN HUKUM LHK	1 DOKUMEN/LAYANAN
PENYUSUNAN EVALUASI DAN PELAPORAN	
MONITORING PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN DIPA PROGRAM PHLHK	1 DOKUMEN/LAYANAN
PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAKIP PHLHK TAHUN 2016	1 DOKUMEN/LAYANAN

	RAKOR EVALUASI KINERJA DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/LAYANAN
	PEMANTAPAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (PEP) PELAKSANAAN KEGIATAN GAKKUM LHK PADA BRIGADE SPORC	1 DOKUMEN/LAYANAN
	PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DITJEN PHLHK TAHUN 2016	1 DOKUMEN
	PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN PHLHK	1 DOKUMEN/LAYANAN
	PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN SETDITJEN PHLHK RA 2916	1 DOKUMEN
PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI		
	PENYUSUNAN BUKU STATISTIK DITJEN PHLHK TAHUN 2016	1 DOKUMEN
	PENYAJIAN INFORMASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN BIDANG GAKKUM LHK	1 DOKUMEN/LAYANAN
	PENYEBARLUASAN INFORMASI BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN/LAYANAN
	PAMERAN PENEGAKAN HUKUM LHK	1 DOKUMEN/LAYANAN
	PENGELOLAAN OPERASIONAL ROOM DATA MANAJEMEN SYSTEM PENEGAKAN HUKUM	1 DOKUMEN/LAYANAN
KEMITRAAN DAN KERJASAMA DALAM NEGERI		
	PENYUSUNAN KURIKULUM TERKAIT HUKUM LHK	1 DOKUMEN
PENYUSUNAN KERJASAMA LUAR NEGERI		
	PENYELENGGARAAN KERJASAMA LUAR NEGERI	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 DOKUMEN
	PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KASUA LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		
	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
	EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYUSUNAN ORGANISASI TATA LAKSANA		
	PEMBINAAN KELEMBAGAAN LINGKUP DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
	PENYUSUNAN DRAT KODE ETIK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LH	1 DOKUMEN

PENGEMBANGAN DAN EDITING SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN STAF DAN PUBLIK TERKAIT	
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	
REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BIDANG PHLHK TA 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017	1 DOKUMEN/ LAYANAN
KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEUANGAN BAGIAN PELAKSANA ANGGARAN SATKER	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PEMBAHASAN KEGIATAN BP/BPP SATKER SETDITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERLENGKAPAN	
EVALUASI KEBUTUHAN SARPRAS DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA	1 DOKUMEN/ LAYANAN
BIMTEK DAN PEMBINAAN PENGELOLA BMN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
SOSIALISASI PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDNAGAN TERBARU TERKAIT PENGELOLAAN BMN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYUSUNAN LAPORAN BMN DITJEN PHLHK SEMESTER II TAHUN 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYUSUNAN LAPORAN BMN DITJEN GAKKUM SEMESTER I TAHUN 2017	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PENYELENGGARAAN KETATAUSAHAAN DAN UMUM	
PENGELOLAAN SURAT/DOKUMEN DINAS	1 DOKUMEN/ LAYANAN
SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
PERJALANAN DINAS PIMPINAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN

BAB III

PERMASALAHAN RENCANA TAHUN 2017

Dalam mencapai sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditemukan beberapa permasalahan bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permasalahan terkait Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain :

A. PERMASALAHAN/TANTANGAN

1. Perencanaan strategis belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pencapaian sasaran kegiatan Nasional di Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016, namun beberapa kegiatan sudah masuk di dalam Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2017;
2. Implementasi Perencanaan Strategis di dalam Anggaran dan Target tidak sesuai dengan alokasi anggaran di Rencana Strategis sehingga Indikator Kinerja Kegiatan Perlu untuk di rubah disesuaikan dengan alokasi APBN-P jika Target Tidak disesuaikan.
3. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut adanya penentuan prioritas kinerja yang perlu dicapai;
4. Transisi Perpindahan Anggaran dari Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dan Balai KSDA ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seiring dengan Pematangan Anggaran Pagu Kementerian/Lembaga di penghujung tahun oleh Kementerian Keuangan;
5. Belum tertibnya pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi;
6. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender lingkup Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Koordinasi antar unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih perlu ditingkatkan;
8. Sistem data dan informasi sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan.

BAB IV KERANGKA PENDANAAN

Skenario pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis tahun 2016, diuraikan pada Tabel 3.1. Skenario pendanaan tersebut telah mempertimbangkan segala kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun hasil evaluasi dari kinerja periode sebelumnya. Pendanaan ini tidak hanya dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga dapat diperoleh dari kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan tersebut di susun secara terperinci setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun melalui delegasi terhadap badan tertentu demi mendukung tercapainya sasaran dan kinerja direktorat ini.

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	Anggaran
	uraian	jumlah
029.10.12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	132,851,754,000
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75,313,590,000
5427.002	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan Nilai Minimal 78,00 9A) di tahun 2019 [Base Line]	12,045,984,000
	BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	5,013,209,000
	BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS	1,116,325,000
	BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	2,225,950,000
	BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	3,690,500,000
5427.994	Layanan Perkantoran	58,167,316,000
5427.995	Kendaraan Bermotor	1,369,940,000
5427.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	201,680,000
5427.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3,528,670,000

Tabel. Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	target		Anggaran
	uraian	vol	sat	jumlah
029.10.12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0		132,851,754,000
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0		75,313,590,000
5427.002	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan Nilai Minimal 78,00 9A) di tahun 2019 [Base Line]	72	Poin	12,045,984,000
	BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	26	Dokumen	5,013,209,000
	BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS	5	Dokumen	1,116,325,000
	BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	8	Dokumen	2,225,950,000
	BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	16	Dokumen	3,690,500,000
5427.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	58,167,316,000
5427.995	Kendaraan Bermotor	4	Unit	1,369,940,000
5427.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20	Unit	201,680,000
5427.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	746	Unit	3,528,670,000

Tabel. Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Program dan Evaluasi Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN				
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan	4	Dokumen	707,450,000
A	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2017	1	Dokumen	389,370,000
B	Penyusunan Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2017	1	Dokumen	9,300,000
C	Rapat Kerja Bidang PHLHK Tahun 2016	1	Dokumen	257,480,000
D	Pembahasan Awal RKP Tahun 2018 Ditjen PHLHK	1	Dokumen	51,300,000
052	Penyusunan Dokumen Anggaran	9	Dokumen	1,767,514,000
A	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK	1	Dokumen	62,675,000
B	Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2017	1	Dokumen	296,090,000
D	Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK	1	Dokumen	249,748,000
E	Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2017	1	Dokumen	209,650,000
F	Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016	1	Dokumen	430,585,000
G	Proses Bisnis Penganggaran Ditjen Gakum LHK	1	Dokumen	63,470,000
H	Kelompok Kerja PUG	1	Dokumen	57,970,000
I	Reviu Anggaran Bidang Penegakan Hukum LHK	1	Dokumen	234,040,000
J	Satgasus Penyelesaian Pengawasan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	1	Dokumen	163,286,000
	TOTAL	13	Dokumen	2,474,964,000
SUB BAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI				
053	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan	7	Dokumen	1,080,631,000
A	Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK	1	Dokumen	49,220,000
B	Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PHLHK Tahun 2015	1	Dokumen	105,151,000
C	Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK	1	Dokumen	367,089,000
D	Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC	1	Dokumen	523,001,000
F	Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2015	1	Dokumen	19,800,000
G	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK	1	Dokumen	6,140,000
H	Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016	1	Dokumen	10,230,000
054	Penyusunan Data dan Informasi	6	Dokumen	1,457,614,000
A	Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015	1	Dokumen	54,500,000
B	Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang GAKUM LHK	1	Dokumen	117,638,000
C	Penyebarluasan informasi bidang PHLHK	1	Dokumen	564,225,000
D	Pameran Penegakan Hukum LHK	1	Dokumen	171,955,000
E	Pengelolaan Operasional Room Data Manajemen System Penegakan Hukum	1	Dokumen	264,255,000
F	Maintenance Aplikasi dan Publikasi Penegakan Hukum LHK	1	Dokumen	285,041,000
	TOTAL	13	Dokumen	2,538,245,000

Tabel. Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Hukum dan Kerjasama Teknis Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
	SUB BAGIAN KERJASAMA TEKNIS	3	Dokumen	650,800,000
055	Penyusunan Kemitraan dan Kerjasama Dalam Negeri	2	Dokumen	179,650,000
A	Penyusunan kurikulum terkait hukum lingkungan hidup dan kehutanan	1	Dokumen	120,650,000
B	Launching Lokakarya dan Pelatihan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	1	Dokumen	59,000,000
056	Penyusunan Kerjasama Luar Negeri	1	Dokumen	471,150,000
A	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	1	Dokumen	471,150,000
	SUB BAGIAN HUKUM	2	Dokumen	465,525,000
057	Penyusunan Rancangan Perundang-undangan	2	Dokumen	465,525,000
B	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	287,625,000
D	Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan	1	Dokumen	177,900,000
	TOTAL	5	Dokumen	1,116,325,000

Tabel. Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
	SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	4	Dokumen	466,615,000
058	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	466,615,000
B	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK	1	Dokumen	126,825,000
D	Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	44,200,000
F	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup PHLHK	1	Dokumen	243,350,000
H	Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan UPT PHLHK	1	Dokumen	52,240,000
	SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	4	Dokumen	1,759,335,000
059	Penyusunan Organisasi Tata Laksana	3	Dokumen	770,155,000
A	Pembinaan Kelembagaan Lingkup Ditjen PHLHK	1	Dokumen	703,270,000
B	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas LH	1	Dokumen	51,325,000
C	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	1	Dokumen	15,560,000
060	Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait	1	Dokumen	989,180,000
A	Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK	1	Dokumen	989,180,000

Tabel. Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Keuangan dan Umum
Tahun 2016

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM				
kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
	SUB BAGIAN KEUANGAN	6	Dokumen	1,381,054,000
061	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	6	Dokumen	1,381,054,000
A	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015	1	Dokumen	231,099,000
B	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016	1	Dokumen	334,984,000
C	Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker	1	Dokumen	327,121,000
D	Penyegaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016	1	Dokumen	204,650,000
E	Pembahasan Kegiatan BP/BPP Satker Setditjen Gakum	1	Dokumen	212,500,000
F	Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 (Revisi DJPB)	1	Dokumen	70,700,000
	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	6	Dokumen	820,136,000
062	Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan	6	Dokumen	820,136,000
A	Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum	1	Dokumen	25,150,000
B	Pemutakhiran data Barang Milik Negara	1	Dokumen	250,250,000
C	Bimtek dan Pembinaan Pengelola BMN	1	Dokumen	165,570,000
D	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan terbaru terkait Pengelolaan BMN	1	Dokumen	44,680,000
E	Penyusunan Laporan BMN Ditjen Gakum Semester I 2016	1	Dokumen	171,586,000
F	Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja	1	Dokumen	162,900,000
	SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN DAN UMUM	4	Dokumen	1,489,310,000
063	Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum	4	Dokumen	1,489,310,000
A	Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen GAKUM	1	Dokumen	154,200,000
B	Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas	1	Dokumen	155,250,000
C	Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1	Dokumen	1,106,496,000
D	Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kementerian LHK	1	Dokumen	73,364,000

Tabel. Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Layanan Perkantoran, Kendaraan Bermotor, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	target		Anggaran
	uraian	vol	sat	jumlah
5427.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12	Bulan Layanan	58,167,316,000
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0		54,377,530,000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0		54,377,530,000
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	0		3,789,786,000
A	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	0		2,335,574,000
B	Langganan daya dan Jasa	0		303,992,000
C	Biaya Pemeliharaan	0		424,220,000
D	Biaya Terkait Operasional Satuan Kerja	0		572,000,000
E	Perjalanan Dinas Pimpinan	0		154,000,000
5427.995	Kendaraan Bermotor [Base Line]	4	Unit	1,369,940,000
007	Peralatan dan Mesin	0		1,369,940,000
A	Kendaraan Operasional Ditjen PHLHK	0		1,369,940,000
5427.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]	20	Unit	201,680,000
009	Data dan Informasi	0		201,680,000
A	Peralatan Pengolah Data	0		122,456,000
B	Pengadaan Peralatan Penunjang Ruang Kerja	0		79,224,000
5427.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]	746	Unit	3,528,670,000
007	Peralatan dan Mesin	0		3,528,670,000
A	Perlengkapan ruang kerja	0		563,636,000
B	Peralatan Penunjang Kinerja Setditjen PHLHK	0		82,000,000
C	Meubelair Kantor Ditjen PHLHK	0		2,675,934,000
D	Perlengkapan Ruang Kerja Eselon I	0		207,100,000

Tabel Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
KS: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan											22,860,000	65,032,518	67,633,393	70,343,552	73,167,835
UK1: Program dan Evaluasi											5,715,000	3,026,110	3,202,138	3,388,456	3,585,666
	<u>S1.P7.K5.UK1.1:</u> Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK														
		<u>S1.P7.K5.UK1.1.UI1:</u> Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%					
		<u>S1.P7.K5.UK1.1.UI2:</u> Nilai SAKIP Dirjen PHLHK	70	72	74	76	78								
		<u>S1.P7.K5.UK1.1.UI3:</u> Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan	52	78	10	10	10								
	<u>S1.P7.K5.UK1.2:</u> Meningkatnya cakupan dan														

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)										
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
	penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan																	
		<u>S1.P7.K5.UK1.2.U11:</u> Jumlah berita media mengenai Kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat	60	80	100	110	120											
		<u>S1.P7.K5.UK1.2.U12:</u> Jumlah kampanye/pameran PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial	12	12	12	12	12											
	<u>S1.P7.K5.UK1.3:</u> Tercapainya data dan Informasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan																	
		<u>S1.P7.K5.UK1.3.U11:</u> Jumlah satker yang memiliki sistem	1	1	10	10	10											

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
		PHLHK dan SDM PHLHK kompeten														
		<u>S1.P7.K5.UK2.1.UI2:</u> Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan	138	188	238	288	338									
		<u>S1.P7.K5.UK2.1.UI3:</u> Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum	154	204	254	304	354									
		<u>S1.P7.K5.UK2.1.UI4:</u> Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	208	238	268	298	328									
	<u>S1.P7.K5.UK2.2:</u> Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien															
		<u>S1.P7.K5.UK2.2.UI1:</u> Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien	51	77	5	5	5									

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
UK3: Keuangan dan Umum																
	<u>S1.P7.K5.UK3.1:</u> Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif															
		<u>S1.P7.K5.UK3.1.U11:</u> Opini WTP untuk laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	<u>S1.P7.K5.UK3.2:</u> Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLLHK															
		<u>S1.P7.K5.UK3.2.U11:</u> Jumlah Manajemen Aset														
		<u>S1.P7.K5.UK3.2.U12:</u> Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker														

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
UK4: Hukum dan Kerja Sama Teknik																
	<u>S1.P7.K5.UK4.1:</u> Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait ditjen PHLHK	dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK														
		<u>S1.P7.K5.UK4.1.U11:</u> Jumlah rancangan Kebijakan strategis	2	2	2	2	2									
		<u>S1.P7.K5.UK4.1.U12:</u> Jumlah NSPK	5	5	5	5	5									
	<u>S1.P7.K5.UK4.2:</u> Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK															
		<u>S1.P7.K5.UK4.2.U11:</u> Jumlah bantuan hukum ditjen PHLHK	5	5	7	8	10									
	<u>S1.P7.K5.UK4.3:</u> Terselenggarakannya kerjasama teknis dalam meningkatkan															
																3,444,903

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	efektifitas kegiatan PHLHK														
		<u>S1.P7.K5.UK4.3.U11:</u> Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola	1	2	3	3	4								
		<u>S1.P7.K5.UK4.3.U12:</u> Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola	2	3	4	5	5								

**GEDUNG MANGGALA WANABAKTI, BLOK IV LANTAI 4
JL. GATOT SUBROTO, DKI JAKARTA 10270**